

PERAN PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG DALAM MENGELOLA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) DENGAN PERSPEKTIF *GOOD ENVIRONMENTAL GOVERNANCE*

Ida Dayu Asri Swastiandari¹⁾, Putu Nomy Yasintha²⁾, Putu Eka Purnamaningsih³⁾

^{1,2,3} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email:dswastiandari@gmail.com¹⁾,putu_nomy@unud.ac.id²⁾,ekapurnama@unud.ac.id³⁾

ABSTRACT

The problem of environmental damage is becoming the concern of many parties. The lack of a role from the government of the Badung district office in implementing green open space management, the management of green open spaces in Badung district has only reached approximately 12% of public green open spaces and where the number for private green open spaces is 18%, which is already far exceeding than required. This has the potential to experience environmental damage along with the progress of development in all fields. Therefore, the author wants to analyze this problem by raising the title "The Role of the Badung Regency Government in handle Green Open Space (RTH) with the Perspective of Good Environmental Governance". Research Methods using qualitative research methods with a descriptive. Data were gathered by observation, interviews, and documentation, analysis using Role Theory Theory (Hendri 2003:264) Indicators of the role of personal relationships, roles related to information, decision-making roles. The findings show that the role of interpersonal relationships, related roles with information, the role of decision makers, Good Environmental Governance. it's been going well. The relationship between individuals is good, judging from the role of each stakeholder in the management of green open space. The role related to information has been shown through actors who play a role in managing Green Open Space (RTH), and coordination involving various elements of the community shows that communication is very good, the ability to be a receiver and voter of information is also very important and can be done well. The role of decision makers has been good, as seen from the various policies implemented by the Badung district government to really help develop Green Open Space (RTH). Meanwhile, based on the GEG perspective, it is good in terms of collaborative governance.

Keywords: *Green Open Space , Badung, Policy*

1. PENDAHULUAN

Tujuan penyelenggaraan hutan kota adalah untuk kelestarian, keserasian, dan keseimbangan ekosistem perkotaan yang meliputi unsur lingkungan, sosial dan budaya. Di dalam hutan kota dapat dilakukan aktifitas sosial masyarakat secara dibatasi, melibatkan kegiatan pasif seperti bersantai, membaca, dan duduk, atau aktifitas yang aktif seperti jogging, senam atau olahraga ringan lainnya. Fasilitas yang

harus disediakan disesuaikan dengan aktifitas yang dilakukan seperti kursi taman, sirkulasi pejalan kaki/ jogging track. Luas ruang hijau dipenuhi dengan berbagai tanaman semusim, minimal 90% dari seluruh luas hutan kota..

Secara fisik Ruang Terbuka Hijau dapat Ruang terbuka hijau alami yang berupa habitat liar, kawasan lindung, dan taman nasional, serta ruang terbuka non hijau merupakan dua kategori ruang

terbuka hijau fisik. Alami atau dibangun, seperti taman, lapangan olahraga, kuburan atau jalur hijau. Dari fungsi ruang terbuka hijau dapat memainkan fungsi ekologi, sosial budaya, arsitektur dan ekonomi. Ruang terbuka hijau publik dan privat memiliki fungsi primer seperti fungsi ekologi dan fungsi tambahan seperti fungsi estetika, ekonomi, arsitektur, dan sosial budaya.

Saat ini, permasalahan yang mengakibatkan kurangnya ruang terbuka hijau adalah masalah pertumbuhan penduduk yang membengkak. Berdasarkan pada data Badan Pusat Statistik (2021) menyatakan bahwa Hasil sensus penduduk September 2020 (SP2020) mencatat jumlah penduduk 270,2 juta jiwa. Dibandingkan dengan hasil SP2010 (tercatat 237,63 juta), SP2020 menghasilkan 32,56 juta lebih banyak penduduk. Dengan luas daratan Indonesia sebesar 1.9 juta km², maka kepadatan penduduk Indonesia sebanyak 141 jiwa per km². Pertambahan jumlah penduduk yang dinyatakan dalam hasil sensus tersebut tentunya berpengaruh terhadap ruang terbuka hijau yang ada di Indonesia. Menurut (Ridayati, 2017) menyatakan bahwa ketersediaan ruang terbuka hijau dipengaruhi oleh jumlah penduduk pada suatu wilayah, dimana semakin bertambah penduduk maka ruang terbuka hijau yang ada di wilayah tersebut akan semakin berkurang dengan adanya lonjakan penduduk tersebut.

Ruang terbuka hijau merupakan masalah serius bagi Indonesia, warga

negara Indonesia yang bertempat besar masih harus mengandalkan keinginan mereka untuk lingkungan yang indah dan rendah polusi. akibat pertumbuhan penduduk dan ruang terbuka hijau yang sempit.

Berdasarkan data Kementerian Menurut Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), hanya 13 dari 174 kota di Indonesia yang menganut konsep kota hijau dan setidaknya 30% lahannya tertutup oleh tanaman hijau. Padahal dalam ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang.

mengenali bernilainya kehadiran ruang terbuka hijau dalam memelihara penyeimbang daerah area perkotaan, serta terdapatnya peraturan hal penyediaan ruang terbuka hijau ,menuntut pemerintah untuk terus berinovasi memaksimalkan peran sumber daya daerah dalam memberikan perlindungan terhadap kelestarian lingkungan. lingkungan dan kesejahteraan masyarakat, maka timbul pertanyaan, seberapa pentingkah peran dalam hal pengaturan penyediaan ruang terbuka hijau, bagaimana pemerintah Kabupaten Badung menerapkan peraturan ruang terbuka hijau, persebarannya, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya..

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih jauh tentang pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) oleh pemerintah Kabupaten Badung dari perspektif tata kelola lingkungan yang baik.

2. KAJIAN PUSTAKA

Good Enviromental Governance terdiri

dari tiga indikator yang nantinya akan memperlihatkan sisi *collaborative governance* didalamnya.

1. Partisipasi

Buah pikiran di balik peran serta adalah bahwa setiap orang memiliki hak untuk mengambil bagian dalam pengambilan keputusan dalam menjalankan pemerintahan (Candrakirana, 2015). Masyarakat dan dunia usaha dapat berperan dalam proses pengambilan keputusan ini selain pemerintah.

2. Rule of law

Negara hukum memiliki tiga unsur dasar, yaitu (1) supremasi negara hukum, yaitu tidak adanya kekuasaan yang sewenang-wenang; (2) persamaan hukum, yang berlaku bagi rakyat biasa dan pejabat publik; (3) perlindungan hak asasi manusia sesuai dengan kebijakan perundang-undangan Hak Asasi manusia (Candrakirana, 2015).

3. Transparansi

Aspek transparansi dalam *Good Environmental Governance* Transparansi tata kelola lingkungan yang baik terkait dengan transparansi kebijakan regulasi. Transparansi adalah ukuran untuk memastikan bahwa informasi tata kelola dapat diakses dan diakses secara bebas oleh semua orang (Candrakirana, 2015).

3. METODELOGI PENELITIAN

Studi ini lebih menekankan pada metode kualitatif dengan menerapkan pendekatan deskriptif dan studi literatur. Dimana dalam studi ini menjelaskan, memaparkan mengidentifikasi tentang peran pemerintah Kabupaten Badung dalam mengelola green open

space. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan deskriptif. Peneliti menentukan informan dengan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling* yaitu pengambilan sampel yang secara sengaja ditentukan oleh peneliti sesuai dengan persyaratan yang diperlukan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan Hubungan Antara Pribadi (*Interpersonal Role*)

Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, indikator peranan hubungan anatar pribadi sudah mampu dilakukan dan dijalankan Pemerintah Kabupaten Badung melauai aktor yang berperandalam pengelolaan Ruang terbuka Hijau (RTH), melalui tindakan-tindakan yang dilakukan oleh setiap pimpinan dari dinas-dinas yang berperan pimpinan di setiap aktor yang berperan menunjukkan ketokohnya melalui representatif, dan selalu berinteraksi dengan masyarakat kemampuan dalam memimpin juga ditunjukkan dengan baik

Peranan Berhubungan dengan Informasi (*Informational Role*) Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti indikator peran yang berhubungan dengan informasi sudah bisa dikatakan dijalankan dengan baik oleh Pemerintah Kabupaten Badung melalui aktor yang berperan dalam mengelola Ruang Terbuka Hijau (RTH), Peran sebagai informasi sudah ditunjukkan melalui aktor yang berperan dalam mengelola Ruang terbuka Hijau (RTH), dan koordinasi yang melibatkan berbagai unsur dari masyarakat menunjukkan komunikasi

yang dijalin sangat baik, kemampuan untuk menjadi penampung dan pemilih informasi juga sangat penting dan bisa dilakukan dengan baik.

Peran Pembuat Keputusan (Decisional Role)

Peran pembuatan keputusan yang dijadikan acuan untuk melihat peran Pemerintah Kabupaten Badung melalui tindakan yang dilakukan aktor yang berperan dalam mengelola Ruang Terbuka Hijau (RTH) sudah bisa dikatakan berjalan dengan baik. Hal ini dilihat dari berbagai kebijakan yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Badung untuk benar-benar membantu mengembangkan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Menunjukkan kemampuan menganalisis situasi yang sangat baik. Komunikasi dan koordinasi terhadap setiap permasalahan yang terjadi memperlihatkan ketelitian dan kehati-hatian yang tinggi, hal ini guna menghindari terjadinya permasalahan baru. Kemampuan berkomunikasi yang baik melalui diskusi ataupun negosiasi dengan masyarakat ketika dihadapkan dengan potensi kerjasama jugamenunjukkan kematangan sebagai seorang pemimpin.

Kebijakan ruang terbuka hijau di Kabupaten Badung menarik dilihat dan dikaji dari prinsip *Good Enviromental Governance*. *Good Enviromental Governance* terdiri dari tiga indikator yang nantinya akan memperlihatkan sisi *collaborative governance* didalamnya. Dalam partisipasi sejauh ini tanggapan masyarakat terhadap keberadaan RTH memiliki respon yang positif. Selain

mendukung keberadaan RTH, masyarakat juga dapat memberi saran dan tanggapan mengenai pengelolaan RTH melalui kecamatan masing-masing. Dan sejauh ini masyarakat sudah dapat memanfaatkan keberadaan RTH sebagai tempat wisata dan dapat menggerakkan perekonomian di lingkungan sekitar. Dari aspek *Rule Of Law*, berdasarkan substansinya berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu negara, dan untuk dasar kebijakan atau *rule of law* yang diterapkan di Kabupaten Badung, dari aspek Transparansi *Good Enviromental Governance*, maka akan ditemukan suatu kajian mengenai korelasi antara kebijakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Badung, dengan *Good Enviromental Governance*. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini diharapkan nantinya dapat menjadi masukan maupun rekomendasi bagi Kabupaten Badung untuk melakukan pengoptimalan- pengoptimal kebijakan ruang terbuka hijau serta optimalisasi anggaran.

Rekomendasi Peran Pemerintah Kabupaten Badung dalam Mengelola Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan perspektif *Good Enviromental Governance*

Peran Pemerintah Kabupaten Badung dalam mengelola Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan perspektif *Good Enviromental Governance* pada dasarnya telah memberikan dampak yang cukup baik terhadap masyarakat. Namun guna mencapai tujuan yang lebih besar yakni

tercapainya Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Tentu ada beberapa permasalahan dan kendala yang harus diatasi terlebih dahulu. Penulis bermaksud memberikan rekomendasi yang dapat dilakukan agar nantinya pelaksanaan penanggulangan ini semakin baik dan optimal dalam mencapai tujuan bersama. Adapun rekomendasi yang dapat penulis sampaikan yaitu :

1. Terkait dengan transparansi seharusnya pemerintah dapat memberikan transparansi dengan mudah kepada masyarakat agar tercipta suatu keharmonisan dan kesinambungan dalam pengelolaan atau pembangunan RTH di Kabupaten Badung. Transparansi tersebut dapat dilakukan dengan memasang baliho ataupun poster terkait dengan realisasi dana yang digunakan dalam pengelolaan RTH di Kabupaten Badung
2. Terkait hal pengelolaan RTH, perlu adanya mekanisme yang mengatur dan Untuk mempertegas dan menjamin terpenuhinya kepastian kebijakan pengelolaan ruang terbuka hijau, diperlukan suatu proses yang mengatur dan menegaskan dalam pasal-pasal yang terdapat di daerah.
3. Perlu adanya program monitoring Penatausahaan taman dan ruang terbuka hijau lainnya perlu terus dipertahankan atau bahkan ditingkatkan, oleh karena itu perlu adanya program pemantauan..
4. Perlu adanya optimalisasi Untuk memastikan Pelaksanaan

pengelolaan ruang terbuka hijau berjalan sesuai rencana, semua elemen yang terkait langsung harus dioptimalkan.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil terkait Mengelola Ruang Terbuka Hijau dengan perspektif *Good Enviromental Governance oleh pemerintah Kabupaten Badung*. Dalam pengelolaan Ruang terbuka Hijau (RTH) sudah menunjukkan perannya sebagai lembaga untuk membantu masyarakat dan hal tersebut berdasarkan 3 (tiga) indikator peran menurut *Henry Minzberg dalam Thoha*.

6. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Berry, D. (1983). *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi*. Jakarta: 1983. Bryne, R. A. (2002). *Psikologi Sosial edisi kesepuluh*. Jakarta: Erlangga.
- Bungin. (2007). *Penelitian kualitatif: komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya (Vol. 2)*. Jakarta: Kencana.
- Cangara, H. (2011). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Cohen, B. J. (1992). *Sosiologi Suatu Pengantar, terjemahan oleh Sahat Simamora*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Dwiyanto, A. (2015). *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif dan Kolaboratif*. Yogyakarta: UGM Press.
- Holley, C. G. (2013). *The new environmental governance*. Routledge.
- Keban, J. T. (2008). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik : Konsep, Teoridan Isu*.

- Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Lyon, T. P. (2009). *Environmental Governance*.
- M, D. W. (2012). *Hubungan Interpersonal*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Maleong. (2010). *Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Mangkunegara, A. P. (2002). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mardiasmo. (2009). *Pengertian Good Governance. Cara Pemerintah Mengelola Sumber Daya Sosial dan Ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat*. Jakarta: World Bank.
- Rivai, V. (2003). *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada.
- Sarwono, S. W. (2002). *Psikologi Sosial Individu & teori psikologi sosial*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sarwono, S. W. (2015). *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhardono, E. (1994). *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sujanto, A. (1991). *Psikologi Umum*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suyitno, A. T. (2012). *Dasar-Dasar Penelitian*. Surabaya: Elka.
- Torang, S. (2014). *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*. Bandung : Alfabeta.
- Umar, H. (2018). *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

Artikel Ilmiah Dan Skripsi

- Addahlawi, H. A. (2019). Implementasi Prinsip ~~Good Governance~~ *Good Governance for the environment*. New p
- Good Governance dalam Pengelolaan Sampah di Indonesia. *Jurnal Green Growth dan Manajemen Lingkungan*, 8(2), 106-118.
- Arianti. (2010). Ruang Terbuka Hijau. *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Rekayasa, edisi Januari*.
- Basuki. (2015). The Implementation of Good Corporate Governance and Its Impact on The Financial Performance of Banking Industry. *The International Journal of Accounting and Business Society*. Vol. 47, No. 3, Stephanie B47-7.
- Candrakirana, R. (2015). Penegakan hukum lingkungan dalam bidang pengelolaan sampah sebagai perwujudan prinsip good environmental governance di kota Surakarta. *Yustisia Jurnal Hukum*, 4(3) 581-601.

- Chiquito, R. F. (2018). *Praktik Good Environmental Governance Dan Sustainable Rural Development Studi Kasus: Desa Rejosari, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang*. *Interaktif: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 84-100.
- Dharmadiatmika, A. (2018). *Konsep Penataan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali*. *Jurnal Arsitektur Lansekap*. 3 (2), 1 – 10.
- Halimatusadiah, E. (2015). *Effects Of The Implementation Of Good Corporate Governance on Profitability*. *Jurnal Penelitian Bisnis dan Inovasi* Vol. 23.
- Kastawan, N. m. (2018). *Lansekap Budaya: Makna dan Peranan Pemakaman Hindu Bali pada Desa-desa Tradisional Bali Aga*. *Seminar Arsitektur Nusantara IPLBI 2018* (pp. 1-7). Bali: UNUD.
- Lestari, S. P. (2014). *Pengembangan Ruang Terbuka Hijau dalam Upaya Mewujudkan Sustainable City (Studi pada Masterplan Pengembangan RTH Tahun 2012-2032)*. *Jurnal Administrasi Publik*, 2(3), 381-387.
- Malek, N. e. (2018). *Measuring Successfulness Of Malaysian Green Open Spaces: An Assessment Tool. Theoretical Empirical Researches in Urban Management*. 13 (2).
- Mensah, C. A. (2016). *Enhancing quality of life through the lens of green spaces: A systematic review approach*. *International Journal of Wellbeing*, 6(1), 142-163.
- Muljono. (2008). *Pendidikan Lingkungan Hidup Bagi Pimpinan Aparatur Pemerintah dalam Mewujudkan Good Environmental Governance*. *Widyaprana* Vol 1, No.2, 98.
- Natsir, S. R. (2015). *Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB) di Kota Palopo*. *Jurnal Universitas Hasanuddin*.
- Nur Faisah, A. L. (2015). *Good environmental governance (studi kasus pengelolaan taman macan di kota Makassar)*. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*.
- Rahmayuni, S. (2017). *Strategi Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Pengembangan Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru Tahun 2014*. *JOM FISIP* Vol. 4 No. 2.
- Ridayati. (2017). *Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Penggunaan Lahan Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Yogyakarta Menggunakan Regresi Linear*. *KURVATEK* Vol.2. No. 1,, 7-13.
- Tiku, D. (2020). *Environmental Governance Dalam Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Pusat Pemerintahan Bukit Pelangi Kabupaten Kutai Timur*. Volume 1. No. 1.
- Vada, W. A. (2015). *Peran Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu*. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau*.
- Yuanti, W. N. (2019). *Pengelolaan Sampah Dalam Perspektif Good Environmental Governance (Studi Kasus Implementasi Program Pengurangan Sampah Rumah Tangga oleh Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota*